



## **PROTOTYPE LAYANAN E- PENGADUAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS WEB**

**Melda Dahoklory<sup>1)</sup>, Caryl Alyona<sup>2)</sup>, Marion Erwin Dien<sup>3)</sup>, Elsa Nania Agustina<sup>4)</sup>, Albertus Lalaun<sup>5)</sup>**

<sup>1,2,3,4)</sup>Jurusan Teknik Elektro, Jurusan Akuntansi<sup>3)</sup> dan Politeknik Negeri Ambon  
<sup>1,2,3,4,5)</sup>[meldadahoklory@gmail.com](mailto:meldadahoklory@gmail.com), [carylalyona@gmail.com](mailto:carylalyona@gmail.com), [marion@gmail.com](mailto:marion@gmail.com), [elsanania@gmail.com](mailto:elsanania@gmail.com),  
[albetuslalaun@gmail.com](mailto:albetuslalaun@gmail.com)

### **ARTICLE HISTORY**

Received:

May 28, 2025

Revised

June 18, 2025

Accepted:

June 18, 2025

Online available:

June 21, 2025

### **Keywords:**

e-Complaints, Violence, Task Force, Polnam, PPKS

\*Correspondence:

Name: Melda Dahoklory

E-mail:

[meldadahoklory@gmail.com](mailto:meldadahoklory@gmail.com)

Kantor Editorial

Politeknik Negeri Ambon

Pusat Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat

Jalan Ir. M. Putuhena, Wailela-

Rumahtiga, Ambon Maluku,

Indonesia

Kode Pos: 97234

### **ABSTRACT**

*Sexual violence is a crime that threatens the integrity and dignity of individuals, and disrupts public order and security. Based on survey data from the Directorate General of Higher Education, Research, and Technology in 2020, 77% of lecturer respondents stated that cases of sexual violence occurred in universities, but 63% of respondents from the victim side chose not to report their cases to the authorities. In addition, universities are the third location for sexual violence with a percentage of 15%. In response to this, the Ambon State Polytechnic (POLNAM) has formed a task force for the prevention and handling of sexual violence (SATGAS PPKS) as an effort to prevent and handle acts of sexual violence that occur in the POLNAM environment. The PPKS Task Force is tasked with providing assistance, guidance and information related to the prevention and handling of sexual violence within the scope of the POLNAM campus. Based on data and information from the Polnam PPKS Task Force Team, there has never been any reporting of sexual violence committed by students. This is due to the lack of information on the existence of the Polnam PPKS Task Force and also the flow of the reporting process and filling out the complaint data form. This process is carried out manually by visiting the Polnam PPKS Task Force and filling out the complaint form. Although efforts have been made to prevent and handle sexual violence, there are obstacles that affect the effectiveness and efficiency of the reporting and handling process. One of the factors that causes minimal reporting is the fear of the confidentiality of victims and reporters when visiting the PPKS Team. So based on this background, a media is needed that acts as a container for Polnam PPKS information which also handles the Internal PPKS reporting process. Electronic complaints are electronic-based systems or platforms that allow the public to submit complaints, suggestions, or aspirations related to public services or the performance of government agencies online. The development of this system uses the Prototype Process Model Software development method. This study aims to implement a prototype of a sexual violence e-complaint system. This system acts as an electronic information media related to PPKS Polnam and the reporting complaint service process related to the work area of SATGAS PPKS at Ambon State Polytechnic.*

**Keywords:** e-Complaints, Task Force, Polnam, PPKS, Violence,

### **1. PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual merupakan salah satu dari bentuk kejahatan yang merusak, melukai, dan mengganggu integritas serta martabat individu. Tidak hanya merugikan korban secara fisik dan emosional, tetapi juga mengganggu keamanan dan ketertiban

Masyarakat. Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau



gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan dengan aman dan optimal" (Feibriandari Yulia 2023)

Berdasarkan data survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi di tahun 2020, sebesar 77% responden dosen menyatakan adanya kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi tetapi 63% responden dari pihak korban memilih untuk tidak melaporkan kasusnya ke pihak berwenang. Selain itu, perguruan tinggi menjadi urutan ketiga lokasi terjadinya kekerasan seksual dengan persentase sebesar 15%.

Politeknik Negeri Ambon merupakan perguruan tinggi vokasi yang bertujuan memberikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, tidak luput dari ancaman kekerasan seksual. Dengan menyikapi hal tersebut Politeknik Negeri Ambon telah membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (SATGAS PPKS) sebagai upaya dalam mencegah dan menangani Tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan POLNAM. SATGAS PPKS ini bertugas untuk memberikan pendampingan, bimbingan dan informasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada ruang lingkup kampus POLNAM. Berdasarkan data dan informasi dari Tim Satgas PPKS Polnam, pelaporan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa tidak pernah ada. Hal ini dikarenakan minimnya informasi keberadaan Tim PPKS Polnam dan juga alur proses pelaporan dan pengisian formulir data aduan. Proses ini dilakukan secara manual dengan mendatangi Tim PPKS Polnam dan mengisi formulir pengaduan. Meskipun telah dilakukan upaya dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pelaporan dan penanganan kasus. Salah satu faktor yang menyebabkan minimnya pelaporan adalah adanya ketakutan kerahasiaan korban dan pelapor. Ketika mendatangi Tim PPKS. Meskipun telah dilakukan upaya dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pelaporan dan penanganan kasus. Keterbatasan aksesibilitas, Pelaporan manual sering kali memerlukan kehadiran korban atau pelapor untuk mengumpulkan data atau mengisi formulir data pengaduan, yang dapat menghambat proses pelaporan jika pelapor tidak berada di tempat. Selain itu, proses mengelola data pelaporan secara manual dapat mengakibatkan tercecernya dokumen data bukti dan pembuatan laporan yang konsisten.

Elektronik pengaduan adalah sistem atau platform berbasis elektronik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, atau aspirasi terkait pelayanan publik atau kinerja instansi pemerintah secara daring. Sistem ini biasanya

terintegrasi dan dapat diakses melalui website atau aplikasi khusus. Sistem elektronik pengaduan bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah dan pelayanan publik, serta memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka secara efisien dan transparan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui platform elektronik, seperti website atau aplikasi, yang terhubung dengan instansi terkait. Pengaduan tersebut kemudian akan diproses dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan sebuah media yang berperan sebagai wadah informasi PPKS Polnam yang sekaligus menanangi proses pelaporan PPKS Internal pengaduan secara online sehingga dapat diakses oleh siapa saja dengan mempertimbangkan privasi pelapor. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan sebuah media yang berperan sebagai wadah informasi PPKS Polnam yang sekaligus menanangi proses pelaporan PPKS Internal.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Suyetno dan Hariadi (2020) Pengertian Kekerasan Seksual Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual (Sari Kurnia Indrayanti Purnama et al. 2022). Menurut *World Health Organization* (WHO) (dalam Sari Kurnia Indrayanti Purnama et al. 2022) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku dan tindakan yang mengganggu, menyebalkan, menjengkelkan yang dilakukan terhadap orang lain dengan maksud tujuan mengarah ke seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau sepihak.

Menurut Pandangan Foucault (dalam Gordon, 2018) pada buku kekerasan seksual oleh (Sari Kurnia Indrayanti Purnama et al. 2022), kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. Maka dapat disimpulkan mengenai penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual dikampus, antara lain:

1. Budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia
2. Adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual



3. Budaya *victim-blaming* yang banyak terjadi sebelumnya
4. Pelajar masih kurang memahami konsep kekerasan seksual
5. Minimnya laporan kekerasan seksual
6. Pihak kampus / lingkungan yang menutupi kasus kekerasan seksual.

Pada Undang-Undang No.22 Pasal 1 Tahun 1961 tentang perguruan tinggi, yang menyebutkan bahwa “perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah”. Namun ternyata masih banyak ditemukan kasus pelecehan seksual pada ruang lingkup perguruan tinggi, hal itu dapat dibuktikan dari survei yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek terhadap 79 perguruan tinggi. Hasilnya adalah 77% dosen mengakui jika kekerasan dan pelecehan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi. (Apriani et al. 2022). Jumlah kekerasan seksual yang telah terjadi pada tahun 2021 mencapai hingga 8.800 kasus. Kasus tersebut terjadi pada lingkup perguruan tinggi dan pada lingkup tempat kerja. Namun ternyata tidak keseluruhan dari kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya, kondisi ini dikarenakan korban banyak yang tidak berani untuk menjadi pelapor terhadap kasus tersebut, walaupun sudah dipahami bahwa pelecehan seksual tidak bisa dibenarkan (Hartarini, Sopi, and Santoso 2023).

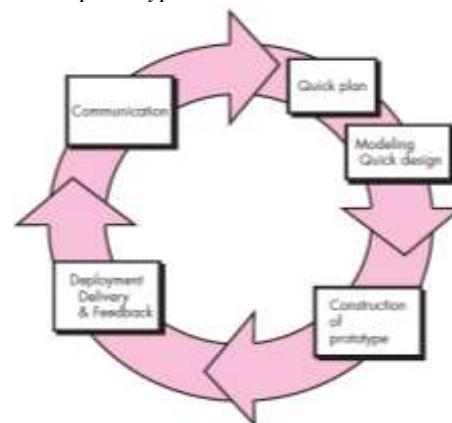
Berdasarkan Data Dirjen Kemendikbudristek, kasus kekerasan seksual yang terjadi dikampus sebesar 77% dan yang tidak melaporkannya sebesar 63%. Dalam rangka untuk meangani kasus pelecehan di Lembaga Pendidikan tinggi ini, permendikbud mengeluarkan permen Nomor 30 tahun 2021, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Selain diatur mengenai ancaman sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual, juga diatur upaya pendampingan, perlindungan, dan Pemulihan bagi tindak pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi (PPKS).

E-pengaduan adalah sistem berbasis elektronik yang memungkinkan masyarakat di lingkungan Polnam untuk menyampaikan pengaduan atau laporan tentang berbagai masalah atau keluhan kekerasan seksual dengan menggunakan media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanis untuk menyajikan konten kepada pengguna, seperti radio, televisi, komputer, dan perangkat seluler. Melalui media elektronik seperti *Handphone*, *SmartPhone*, *Tablet*, *Laptop* pelapor dapat mengakses sistem e-pengaduan. Sistem seperti ini sering digunakan oleh pemerintah, organisasi, atau perusahaan untuk mempermudah proses pengaduan dari masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mempercepat penanganan masalah. Sedangkan E-pengaduan kekerasan seksual adalah

sistem berbasis elektronik yang dirancang khusus untuk memfasilitasi atau sebagai media pengaduan terkait kekerasan seksual. Sistem ini memudahkan korban atau saksi untuk melaporkan kasus kekerasan seksual secara *online* tanpa harus melalui proses yang rumit atau menghadapi stigma sosial yang seringkali menyertai pelaporan kasus semacam itu.

### 3. METODOLOGI

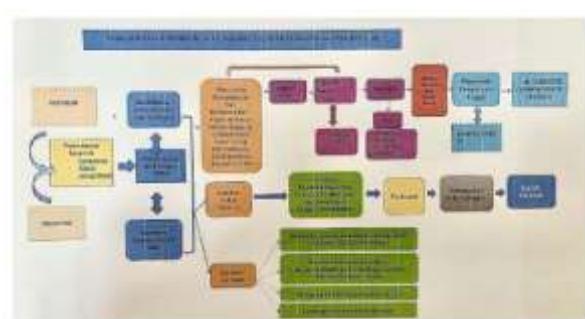
Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model proses *Prototyping*. *Prototype* merupakan satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna, serta bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Model prototype adalah pendekatan dalam pengembangan sistem atau produk, baik fisik maupun digital, yang melibatkan pembuatan versi awal atau purwarupa untuk menguji konsep dan fungsionalitas sebelum pengembangan penuh. Prototipe ini membantu pengembang dan pengguna untuk mendapatkan gambaran jelas tentang sistem yang akan dibangun, mengidentifikasi potensi masalah, dan melakukan perbaikan sebelum produk akhir dirilis. Semua rancangan diagaram atau model yang dibuat tidak diharuskan telah sempurna dan final dalam pendekatan *prototype*.



Sumber: (Dharmaningtyas Gofariyanti and Tristiyanto 2022)

Gambar 1. Model Proses Prototype

Berikut ini merupakan proses pengaduan dan pelaporan kekerasan seksual POLNAM dengan mekanisme sebagai berikut:



Prototype Layanan E- Pengaduan ...



Sumber: (PPKS Polnam, 2024)

**Gambar 2. Alur Manual Proses Penerimaan Pelaporan Satgas PPKS POLNAM**

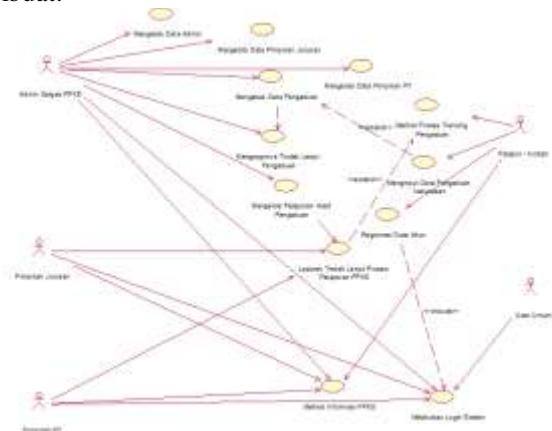
#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan hasil penerapan metode Prototype sebagai berikut:

- 1) **Communication:** Tahap komunikasi adalah proses awal dalam pengembangan prototipe yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan harapan pengguna serta menjelaskan tujuan proyek. Pada tahap ini, pengembang berinteraksi dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membangun prototipe. Pada tahap ini yaitu mengumpulkan kebutuhan dan persyaratan dari SATGAS PPKS dan studi literatur guna mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi korban dalam melaporkan kekerasan seksual dan mengumpulkan masukan tentang fitur yang diinginkan dalam sistem e-pengaduan. Kebutuhan dari Satgas PPKS Polnam adalah sebuah media informasi untuk mengkomunikasikan keberadaan Satgas PPKS sekaligus sebagai wadah untuk proses pelaporan permasalahan kekerasan seksual.
  - 2) **Quick Plan:** Tahap *quick plan* adalah proses perencanaan awal yang bertujuan untuk menentukan apa yang akan dikembangkan dalam prototipe. Fokus pada perencanaan cepat memungkinkan pengembang untuk mengidentifikasi fitur utama dan merencanakan proses pembuatan prototipe secara efisien. Pada tahap kedua yaitu membuat rencana awal untuk pengembangan prototipe. yaitu menentukan tujuan utama dari sistem e-pengaduan dan membuat daftar fitur utama yang akan dimasukkan dalam prototipe.
  - 3) **Modeling Quick Plan:** Tahap *modeling quick plan* melibatkan pembuatan desain awal atau model sistem berdasarkan rencana yang telah dibuat. Model ini memberikan gambaran visual atau fungsional dari bagaimana sistem akan bekerja, dan digunakan untuk komunikasi lebih lanjut dengan pengguna dan pemangku kepentingan. Pada tahapan ini, dilakukan proses pembangunan *prototype* desain perangkat lunak dengan membuat dan mengidentifikasi konsep rancangan desain *software*. Pada tahap ini penulis membuat desain berupa *Use Case Diagram*, *Activity Diagram* dan Rancangan *User Interface*. Tentunya *Design* yang akan dibuat memiliki ketentuan mudah digunakan dan ramah

pengguna, terutama bagi korban kekerasan seksual

- 4) ***Construction Of Prototyping:*** Tahap *construction of prototyping* adalah proses pembuatan prototipe fungsional yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem secara nyata. Ini adalah langkah praktis di mana prototipe dibangun berdasarkan desain yang telah dibuat. Pada tahap ini, yaitu dimulainya membangun prototype sesuai dengan rancangan yang dibuat.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2024)

Gambar 3. Usecase Diagram Prototype Layanan e-Pengaduan PPKS Polnam

## Implementasi Prototype Sistem Layanan e-Pengaduan Satgas PPKS POLNAM

Tampilan ini merupakan Tampilan utama user dimana pada tampilan ini menampilkan menu beranda, Informasi Berita kekinian PPKS, layanan tentang kami, layanan pengaduan, layanan pelacakan status pengaduan, dan Kontak.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2024)

Gambar 3. Tampilan Utama Prototype E-Layanan Pengaduan PPKS POLNAM

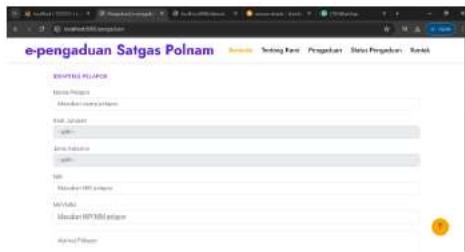
Pengguna dapat melakukan proses pengaduan dengan mengakses fitur layanan pengaduan.

# JURNAL SIMETRIK (Sipil, Mesin, Listrik)

<https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalSimetrik>

Online ISSN: 2581-2866

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2024)  
Gambar 5. Tampilan Prototype E-Layanan Pengisian Data Pengaduan



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2024)  
Gambar 6. Tampilan Respon pengisian data Pengaduan

Tampilan ini merupakan Halaman untuk membuat pengaduan yang berisi formulir untuk mendeskripsikan kekerasan seksual yang terjadi. Formulir berisi mengenai identitas pelapor, identitas korban dan identitas pelaku. Serta kronologi kejadian berupa deskripsi dan bukti yang bisa diinput berupa audio, video dan foto. Formulir yang tertera merupakan formulir yang diberikan oleh Satgas PPKS POLNAM.

Setelah pengaduan berhasil dikirim, sistem akan memberikan Nomor Tiket (Kode Pengaduan Privasi) dari pengaduan tersebut guna melacaknya. Selain tertera dalam halaman web, nomor tiket juga akan dikirimkan melalui nomor Whatsapp pelapor secara *real time*.

Selanjutnya Pelapor / Korban dapat melakukan proses pelacakan pengaduan.



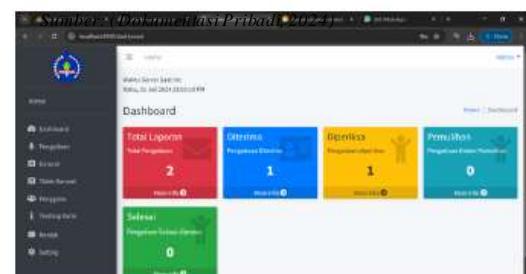
Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2024)  
Gambar 7. Tampilan Pemasukan data Kode tiket Pengaduan (Kode Privasi Pelacakan Pengaduan)



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2024)  
Gambar 8. Tampilan Status Pelacakan Pengaduan

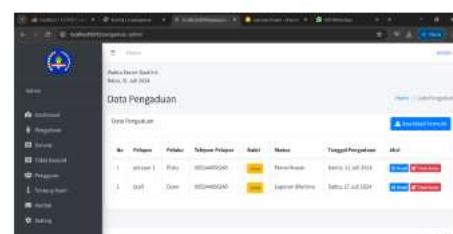
Tampilan ini menampilkan Halaman Status Pengaduan guna melacak status pengaduan menggunakan nomor tiket yang didapatkan ketika berhasil mengajukan pengaduan. Halaman ini akan menampilkan status dari pengaduan yang telah diajukan berdasarkan SOP dari Satgas PPKS Polnam.

Selanjutnya pihak PPKS akan menerima hasil laporan Pelapor untuk proses selanjutnya diproses. Tampilan ini menampilkan *dashboard* dari halaman admin. Halaman ini menampilkan data dari jumlah pengaduan yang telah masuk kedalam sistem. data yang akan ditampilkan berdasarkan status, yaitu total laporan, laporan diterima, pemeriksaan, pemulihan dan kasus selesai.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2024)  
Gambar 9. Tampilan Dashboard Admin

Tampilan ini menampilkan dari pengaduan yang telah diajukan oleh user. Admin dapat mengubah status pengaduan sesuai dengan yang sedang dijalankan. Admin juga dapat mencetak formulir pengaduan tersebut apabila dibutuhkan. Jumlah halaman pengaduan yang telah diterima akan secara langsung ter-update pada *dashboard user* dan *dashboard admin*.



Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2024)  
Gambar 6. Tampilan Data Pengaduan



Selanjutnya Pihak PPKS akan memproses data sesuai dengan informasi pengaduan didalam sistem. Pelepor akan di surati secara internal untuk melanjutkan proses pengaduan yang dilaporkan.

Uji sistem e-pengaduan adalah proses untuk memastikan bahwa sistem pengaduan elektronik (e-pengaduan) berfungsi dengan baik, sesuai dengan harapan, dan dapat diandalkan. Pengujian ini mencakup berbagai aspek, termasuk fungsionalitas, keamanan, kinerja, dan kegunaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau masalah sebelum sistem digunakan secara luas oleh masyarakat. aspek yang diujikan adalah aspek fungsionalitas untuk Memastikan semua fitur dan fungsi sistem berfungsi sebagaimana mestinya, seperti pengiriman pengaduan, penerimaan notifikasi, pelacakan status, dan pengelolaan data. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan model Pengujian *Black-box* tanpa mengetahui struktur internal sistem. Penguji hanya berfokus pada input dan output sistem. Hasil pengujian black-box menunjukkan apakah perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan tanpa perlu mengetahui detail internal kode. Pengujian ini berfokus pada input dan output, mencari kesalahan seperti fungsionalitas yang salah, kesalahan antarmuka, kesalahan dalam struktur data atau akses database, kesalahan kinerja, dan kesalahan inisialisasi/terminasi.

Hasil Pengujian sistem black box sebagai berikut.

Tabel 1. Skenario Input Data Admin

No	Skenario Pengujian	Uji Kasus	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Mengisi semua isian data login, lalu menekan tombol login	Username: (Dikosongkan) Password: (Dikosongkan)	Sistem menolak akses login dan menampilkan pesan: Username dan password harus diisi.	Sesuai Harapan
2	Mengisi username yang salah dan mengisi password yang benar lalu menekan tombol login	Username: AdminSalah Password: 123456	Sistem menolak akses login dan menampilkan pesan: email/password tidak ditemukan.	Sesuai Harapan
3	Mengisi username dan password yang benar lalu menekan tombol login	Username: rendsteve1 Password: 123456	Sistem menerima akses login dan kemudian akan menuju ke halaman utama sistem.	Sesuai Harapan

Tabel 2. Skenario Edit Data Admin

No	Skenario Pengujian	Uji Kasus	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Mengisi semua isian data login, lalu menekan tombol simpan	Nama depan: Admin Nama belakang: Satu Username: admin1	Pembahaman data admin diterima dan menampilkan pesan: Silahkan konfirmasi untuk menyelaskan pendaftaran.	Sesuai Harapan
2	Menekan link setelah berhasil input data admin.	Menekan: Klik link distul	Pembahaman data admin diterima dan menampilkan pesan: Pendaftaran berhasil dengan password: "DishubDerek" (tanda petik) silahkan ganti password setelah login.	Sesuai Harapan
3	Mengisi semua isian dan mengisi username yang sudah ada pada sistem dan menekan tombol simpan	Nama depan: Admin Nama belakang: Satu Username: admin1	Pembahaman data admin ditolak dan menampilkan pesan: Username sudah dipakai.	Sesuai Harapan

Tabel 3. Skenario Cek Status Pelaporan Data

No	Skenario Pengujian	Uji Kasus	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Menulih periode atau tanggal mulai dan tanggal selesai yang tidak ada datanya	Dari tanggal: 19-Februari-2018 S/d tanggal: 19-Februari-2018	Pencetakan laporan data pesanan ditolak dan menampilkan pesan: Data tidak ada.	Sesuai Harapan

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di lakukan dapat di simpulkan bahwa Prototype sistem layanan e-pengaduan PPKS Polnam telah diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dari Satgas PPKS. Fitur dari prototype sistem ini berupa media informasi tentang keberadaan Satgas PPKS Polnam, Berita kekinian terkait PPKS, Layanan Pengaduan PPKS, dan Status Pelacakan Proses pengaduan serta data laporan berkala pengaduan yang bisa diakses Satgas PPKS Polnam dan pihak Pimpinan Jurusan. Prototype sistem ini telah diujikan dengan menggunakan metode *testing Blackbox*. Uji sistem e-pengaduan ini adalah bagian dari proses untuk memastikan bahwa sistem pengaduan elektronik (e-pengaduan) berfungsi dengan baik, sesuai dengan harapan, dan dapat diandalkan. Pengujian ini mencakup berbagai aspek, termasuk fungsionalitas sistem. Semua fitur yang diujikan dapat berjalan sesuai dengan fungsionalitas sistem yang diharapkan.

### 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diusulkan sebagai berikut:

1. Sistem ini dapat ditindaklanjut penggunanya sehingga mendukung proses pengaduan Satgas PPKS di Politeknik Negeri Ambon.
2. Sistem dapat dikembangkan ke berbagai *platform* seperti Android dengan menambahkan fitur-fitur sesuai



perkembangan kebutuhan Pihak Satgas PPKS Polnam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Wahidin. 2013. "ANALISA KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)."
- Agustini Syarifah Putri Alkadri, and Insani Rachmat Wahid Saleh. 2019. "Rancang Bangun Aplikasi Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada
- Apriani, Alifia Rustina, Miranti Prihastini, Nuri Amalia Utami, Siti Aminah, Suci Indah, Permata Sari, Mahasiswa; Program, Studi Pendidikan Pancasila, Dan
- Dharmaningtyas Gofariyanti, and Tristiyanto. 2022. *Penerapan Metode Prototyping Dalam Pengembangan Sistem Audit Internal Tingkat Program Studi (Studi Kasus: Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung) 1*. Vol. 3.
- DPPPA Kalimantan Barat." *JEPIN ( Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika) 5(3)*.
- Febridari Yulia. 2023. "STRATEGI SATGAS PPKS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI." *URLawReview* 7(1).
- Firdiansyah Indra, Riki, Wulandari Kiki, Susanthi Putu Ranu, and Nasruji. 2022. "RANCANG BANGUN SISTEM PENGADUAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI." *JURISMA*.
- Hartarini, Yovita Mumpuni, Sopi, and Ignatius Hari Santoso. 2023. "WHISTLEBLOWING PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: DIFERENSIASI ANTARA PRIA DAN WANITA." *Jurnal Manajemen* 19(2). doi: 10.25170/jm.v19i2.3517.
- Hutabri, Ellbert, Anggia Dasa Putri, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Dan Komputer, Universitas Putera Batam, and Jl R. Soeprapto -Batam. 2019. "Jurnal Sustainable: Jurnal Hasil Penelitian Dan Industri Terapan." 08(02):57–64.
- Iqbal. C. R Muhammad, Husni Muchammad, and Studiawan Hudan. 2012. "Implementasi Klien SIP Berbasis Web Menggunakan HTML5 Dan Node.Js." *JURNAL TEKNIK ITS* 1.
- Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, and Universitas Pamulang. 2022. "Internalisasi Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Terkait Manfaat Pelaksanaannya Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB)* 2(1):2809–5154.
- Khayati Nikmatul, Maidaliza, Asmaret Desi, Pramana Cipta, Ramadani Ismar, Meinarisa, Girsang Bina Melvia, Alfianto Ahmad Guntur, and Suminah. 2022. *KEKERASAN SEKSUAL*. Kota Bandung: CV MEDIA SAINS INDONESIA.
- Permata Putri, Meidyan, Ebtaria Nadeak, Nurlaili Rahmi, Arsia Rini, Diah Novita Sari, Herlinda Kusmiati, and Rendy Almahiheri Adhi Pratama. 2023. *SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA MENGGUNAKAN MySQL*.
- Purnomo, Dwi. 2017. "Model Prototyping Pada Pengembangan Sistem Informasi." *JIMP- Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan* 2(2).
- Sari Kurnia Indrayanti Purnama, Farida Lisnawati Nur, Prameswari Veryudha Eka, Sopia Rini, and Febio Jimmy. 2011. "MEMBANGUN APLIKASI E-LIBRARY MENGGUNAKAN HTML, PHP SCRIPT, DAN MYSQL DATABASE." *Jurnal PROCESSOR* 6(2).
- Suprayogi, Bambang, and Abdur Rahmesta. 2019. "PENERAPAN FRAMEWORKBOOTSTRAP DALAM SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 PACET CIANJUR JAWA BARAT." *TEMATIK - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 6(2).